

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya, 1992.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Karya, 2001.
- Adriaan W. Bedner. Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum, dalam Adriaan W. Bedner, dkk., ed. *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Angkasa Pura I. *Reposisi & Restrukturisasi Bisnis PT. Angkasa Pura I (Persero) "Menuju World Class Airport"*. 2010.
- Dudu Duswara Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*. Cetakan. 3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- H.K. Martono. *Hukum Angkutan Udara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Jeffrey Rawis. Menjahit laut yang robek: paradigma "archipelago state" Indonesia: Batam, maksimalisasi pendayagunaan pulau kecil : 'platform' baru pembangunan ekonomi kelautan. Yayasan Malesung, 2004.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet. Ke-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Buku Saku KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018
- Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali. *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010.
- Maria Farida Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1980.
- Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2010.
- Pieter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia, 2002.
- Rinduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999.
- Salim HS. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2006.
- Sudikno Mertokusumo. *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*. Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana, Universitas Gajah Mada. 1987.

- Sutan Remi Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Tjipto Subadi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006
- Trias Melia. *Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Percepatan Penyediaan Infrastruktur*. Republik Indonesia Tinjauan Ekonomi & Keuangan: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2015

#### **ARTIKEL JURNAL:**

- Mora, Minda dan Ali Murthado. (2015). Analisis Potensi Pengembangan Aerotropolis di Bandar Udara Internasional Kualanamu Medan. Warta Ardhia, *Jurnal Perhubungan Udara*. Volume 41 (3), 64. Diakses dari [https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-setiap-saat/ardhia\\_2015.pdf](https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-setiap-saat/ardhia_2015.pdf)
- Jarach, David. (2001). *The Evolution of Airport Management Practices: Toward A Multi-Point, Multi-Services, Marketing-Driven Firm*, *Journal of Air Transport Management*, Volume 7(2), 119-125. [https://doi.org/10.1016/S0969-6997\(00\)00038-7](https://doi.org/10.1016/S0969-6997(00)00038-7)
- Zaenuddin, Muhammad. (2017). *Dualisme Kelembagaan Antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian Di Kota Batam*, *Journal of Applied Business Administration* Volume 1(2), 220. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.613>

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 44 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penerbangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bandar Udara Hang Nadim Batam Oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan  
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015 tentang Koneksi dan Bentuk Kerjasama lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan  
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2015 Tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara  
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 179 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan  
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 187 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 tahun 2015 Tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara  
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional  
Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor. 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Civil Aviation, Chicago Convention 1944.  
Komisi Persaingan Usaha. Putusan Nomor 13/KPPU-I/2014.

## **INTERNET**

[https://angkasapura2.co.id/id/business\\_relation/our\\_airport](https://angkasapura2.co.id/id/business_relation/our_airport) diakses pada tanggal 26 November 2020, pukul 11.10 WIB.  
<https://ap1.co.id/id/about/our-history> diakses pada tanggal 26 November 2020, pukul 11.15 WIB.  
<https://hangnadimairport.bpbatam.go.id/homepage> diakses pada tanggal 30 November 2020, pukul 11.09 WIB.  
<https://id.changiairport.com/berita/bandara-changi-dinobatkan-sebagai-bandara-terbaik-di-dunia-selama-tujuh-tahun-berturut-turut-oleh-wisatawan-udara> diakses pada tanggal 19 Oktober 2020, pukul 19.13 WIB.  
<https://money.kompas.com/read/2020/06/26/124617026/ap-i-sediakan-galeri-untuk-tampung-600-umkm-di-bandara-yia> diakses pada tanggal 19 Oktober 2020, pukul 17.45 WIB.  
<https://www.skyscanner.co.id/bandara/bth/batam-bandara.html> diakses pada tanggal 30 November 2020, pukul 11.25 WIB.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Ricardo Ginting selaku Konsultan BP Batam via Zoom pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB  
Wawancara dengan Robert Sianturi selaku Staff Advokasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara via Whatsapp Call pada tanggal 16 November 2020 pukul 19.00 WIB

Wawancara dengan Robert Sianturi selaku Staff Advokasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 17.30 WIB di Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat

Wawancara dengan Ryan selaku Staff Peraturan di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 15.00 WIB di Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat

